ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1999-2014

(Skripsi)

Oleh

M. ALYURIZA SYALKAHFI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1999-2014

Oleh

M. ALYURIZA SYALKAHFI

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung menurut Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional pada Tahun 2014 berada pada peringkat menengah ke bawah. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena secara letak geografis, Lampung memiliki letak yang sangat berdekatan dengan ibukota DKI Jakarta, dan Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (GRWT), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (EGE), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (HGE) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data runtun waktu *(time series*) selama periode 1999-2014. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, EDUCATION GOVERNMENT EXPENDITURE, AND HEALTH GOVERNMENT EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX OF LAMPUNG PROVINCE 1999-2014 PERIOD ANALYSIS

By

M. ALYURIZA SYALKAHFI

Human Development Index of Lampung Province based on Badan Pusat Statistik (BPS) nationally low middle ranked on 2014 period. It should not be happened because geographically, Lampung is located very close with the capital of this country, DKI Jakarta, and Lampung is the gate of Sumatera Island. The purpose of this research is to find out the influence of economic growth, education government expenditure, and health government expenditure on human development index of lampung Province. The data that used are time series data during 1999-2014 period. The hypotheses test used Ordinary Least Square (OLS) analysis technique.

This research result shows that economic growth variable, education government expenditure variable, and health government expenditure variable have a positive influence on human development index of Lampung Province.

Keywords : Economic Growth, Education Government Expenditure and Health Government Expenditure.

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1999-2014

Oleh

M. ALYURIZA SYALKAHFI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1999-2014**

Nama Mahasiswa : *M. Alyuriza Syalkahfi*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1211021078

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Emi Maimunah, S.E., M.Si.
NIP 19800218 200501 2 002

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Emi Maimunah, S.E., M.Si.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juni 2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi sesuai peraturan yang berlaku."

Bandar Lampung, 7 Juni 2016

Penulis,

METERAI TEMPEL
B63BEADF654555472
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Alyuriza Syalkahfi

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 April 1994, sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Cik Ali Ayub dan Ibu Herniza Nurzalina.

Penulis memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Bandar Lampung pada Tahun 1999, dilanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukarame Bandar Lampung pada Tahun 2000. Kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2012.

Pada Tahun 2012 penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung pada Tahun 2016.

Selama masa kuliah penulis aktif di organisasi Economic English Club (EEC) FEB Unila.

MOTO

“Everything will be okay in the end, if it’s not okay, it’s not the end”
(**John Lennon**)

“He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life”
(**Muhammad Ali)**

”Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(**HR. Turmudzi**)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan segenap ketulusan dan rasa syukur kupersembahkan karya yang sederhana tapi berharga bagiku ini kepada :

Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas doa yang selama ini diberikan untuk kelancaran skripsi ini sampai dengan tahap akhir.

Adik–adikku tersayang dan keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat untukku.

Dosen-dosen serta sahabat-sahabat terbaik yang turut memberikan arahan, dukungan, juga doa yang menambahkan semangat atas selesainya skripsi ini.

Juga almamater tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 1999-2014" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, pengarahan, dan banyak memberikan pelajaran serta motivasi yang sangat berharga bagi Penulis

4. Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E. selaku dosen penguji skripsi atas saran serta motivasi yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Deddy Yuliawan S.E., M.Si., sebagai Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di Universitas Lampung.
7. Keluargaku tercinta, ayah yang tiada hentinya mendukung, ibu yang tak pernah lelah mendoakan, adikku Rahmi, Hafiz, dan Azmi yang selalu memberikan semangat dan doa yang tulus dan ikhlas.
8. Staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak Kasim, Bang Fery, Bang Ma'ruf, Ibu Yati, Bapak Rohaidi serta pegawai lainnya yang telah banyak membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman terbaikku Vivi Ningtia Sari, Sandy Prasetyo, Normandia Akbar, Rendy Bayu untuk kebaikan, semangat dan canda tawa selama awal perkuliahan sampai dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012 Medi, Hara, Handicky, Ageng, Nizar, Asri, Deo, Julian, Ulung, Soni, Rayyan, Epsi, Erinda, Anita, Aprida, Danty, Ulfa, Jepri, Ade, Faisal, Erik, Gerry, Maulidya, Sinta, Arli, Rini, Rina, Adi, Almira, Athina, Bella, Dede, Devina, Frisca, Mardela, Budi, Tommy dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
11. Teman-teman KKN Desa Gedung Meneng Baru Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang Januari 2015 yang selalu ada di hati Indah, Wayan, Nelly, Adit yang telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa.

12. Keluarga EEC Unila Kak Sonia, Kak Egha, Kak Dila, Kak Kaka, Kak Rudi, Kak Ega, Kak Ayu, Kak Lae, Kak Sinta, Kak Mirta, Kak Surya, Kak Iwan, Kak Aji, Kak Ahmad, Kak Anun, Iin, Kiki, Yunita, Ines, Elia, Cita, Hanum, Keke, Laras, Pandu, Sindy, Winy, Saput, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
13. Dan almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 7 Juni 2016

Penulis,

Muhammad Alyuriza Syalkahfi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Kerangka Pemikiran 11
F. Hipotesis Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Manusia 15
1. Konsep Pembangunan Manusia 15
2. Indeks Pembangunan Manusia 18
3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia 21
B. Pertumbuhan Ekonomi 26
1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 26
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 27
3. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM 33
C. Pengeluaran Pemerintah 34
1. Jenis Pengeluaran Pemerintah 35
2. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan IPM 41
D. Penelitian Terdahulu 43

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data 45

B. Batasan Variabel Operasional 46
C. Spesifikasi Model Penelitian 48
D. Pengolahan Data 48
E. Metode Pengumpulan Data 49
F. Evaluasi Model 49
1. Uji Normalitas 49
2. Uji Heterokedastisitas 50
3. Uji Multikolinieritas 51
4. Uji Autokorelasi 51
G. Pengujian Hipotesis 52
1. Uji Signifikansi Individu (Uji t) 52
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 54
H. Koefisien Determinasi 55

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Estimasi 56
B. Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik 58
1. Uji Normalitas 58
2. Uji Heterokedastisitas 59
3. Uji Multikolinieritas 60
4. Uji Autokorelasi 60
C. Hasil Uji Hipotesis 61
1. Uji t (Uji Signifikansi Individu) 61
2. Uji F (Uji Signifikansi Simultan) 63
D. Penafsiran Koefisien Determinasi 64
E. Pembahasan Hasil Penelitian 65
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM 65
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM 66
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap IPM 67

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Indeks Pembangunan Manusia Tiap Provinsi Di Indonesia Tahun 1999 dan 2013 4
2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014 8
3. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum IPM 21
4. Kriteria Pemeringkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia 25
5. Deskripsi Variabel 45
6. Hasil Perhitungan Regresi 56
7. Hasil Uji Normalitas 58
8. Hasil Uji Heteroskedastisitas 59
9. Hasil Uji Multikolinearitas 60
10. Hasil Uji Autokorelasi 61
11. Hasil Uji t Statistik Dengan Tingkat Kepercayaan 95% 62
12. Hasil Uji F Statistik Dengan Tingkat Kepercayaan 95% 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2004-2014 6
2. Bagan Kerangka Pemikiran 13
3. Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia 20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Data IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 1999-2014 ..... L1
2. Hasil Uji OLS pada variabel IPM, GRWT, EGE dan HGE L2
3. Hasil Uji Normalitas L3
4. Hasil Uji Heteroskedastisitas L4
5. Hasil Uji Multikolinearitas L5
6. Hasil Uji Autokorelasi L6
7. Tabel Distribusi t L7
8. Tabel Distribusi F L8

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP, 1990). Pada prinsipnya tujuan dasar dari adanya pembangunan ini yaitu dengan memperbanyak pilihan kepada penduduk dimana pilihan-pilihan ini tidak terbatas dan dapat berubah kapan saja, sehingga penduduk bisa memperoleh akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, nutrisi dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mata pencaharian yang aman, dan sebagainya. Hal ini bisa dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang dapat memungkinkan orang-orang menikmati hidup yang panjang, sehat dan kreatif (Haq, 1998).

Elemen-elemen pembangunan manusia secara tegas menggaris bawahi sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan dapat menikmati hidup secara layak. Ini berarti pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat. Karena itu, manusia merupakan sentral dari proses pembangunan tersebut (Nagib, 2008).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Ananta, 2013).

Menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan diharapkan dapat menciptakan peluang-peluang yang secara langsung menyumbang upaya memperluas dan meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas kehidupan mereka, antara lain melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar dan jaminan sosial (Sen, 1999). Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantaranya investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Usmaliadanti, 2011).

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan bukti konkrit peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Sektor pengeluaran pemerintah yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan (Usmaliadanti, 2011).

Di Indonesia masalah pembangunan manusia menarik untuk dibicarakan. Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan, pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan dasar. Sejak disepakatinya *Millenium Development Goals* (MDG's) oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000, MDG's merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara berkembang terhadap visi pembangunan. Visi ini menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara *sustainable* (berkelanjutan).

Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah serta jumlah penduduk yang besar ternyata memiliki nilai IPM yang tergolong menengah ke bawah dalam peringkat dunia. Indonesia kini menduduki peringkat 108 dari 187 negara yang ada di dunia

(publikasi *UNDP*, Tahun 2013**).** Posisi peringkat IPM Indonesia merupakan akumulasi dari total angka IPM pada level propinsi yang ada di Indonesia. Tabel 1 menunjukan bahwa Propinsi Lampung mengalami penurunan dari posisi ke 18 menjadi posisi ke 21 dalam peringkat IPM per propinsi yang ada di Indonesia.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Tiap Provinsi Di Indonesia Tahun 1999 dan 2013

Peringkat	**Provinsi**	**1999**	**Peringkat**	**Provinsi**	**2013**
1	DKI Jakarta	72.50	1	DKI Jakarta	78.59
2	Yogyakarta	68.70	2	DI Yogyakarta	77.37
3	Kalimantan Timur	67.80	3	Sulawesi Utara	77.36
4	Riau	67.30	4	Kalimantan Timur	77.33
5	Maluku	67.20	5	Riau	77.25
6	Sumatera Utara	67.10	6	Kepulauan Riau	76.56
7	Kalimantan Tengah	66.70	7	Kalimantan Tengah	75.68
8	Sumatera Utara	66.60	8	Sumatera Utara	75.55
9	Sumatera Barat	65.80	9	Sumatera Barat	75.01
10	Bali	65.70	10	Kalimantan Utara	74.72
11	Jambi	65.40	11	Bengkulu	74.41
12	Aceh	65.30	12	Sumatera Selatan	74.36
13	Bengkulu	64.80	13	Jambi	74.35
14	Jawa Tengah	64.60	14	Bangka Belitung	74.29
15	Jawa Barat	64.60	15	Bali	74.11
16	Sumatera Selatan	63.90	16	Jawa Tengah	74.05
17	Sulawesi Selatan	63.60	17	Jawa Barat	73.58
18	**Lampung**	**63.00**	18	Jawa Timur	73.54
19	Sulawesi Tenggara	62.90	19	Sulawesi Selatan	73.28
20	Sulawesi Tengah	62.80	20	Aceh	73.05
21	Kalimantan Selatan	62.20	**21**	**Lampung**	**72.87**
22	Jawa Timur	61.80	22	Maluku	72.70
23	Kalimantan Barat	60.60	23	Sulawesi Tengah	72.54
24	NTT	60.40	24	Banten	71.90
25	Papua	58.80	25	Gorontalo	71.77
26	NTB	54.2	26	Kalimantan Selatan	71.74
27	Bangka Belitung	-	27	Sulawesi Tenggara	71.73
28	Kepulauan Riau	-	28	Sulawesi Barat	71.41
29	Banten	-	29	Kalimantan Barat	70.93
30	Gorontalo	-	30	Maluku Utara	70.63
31	Sulawesi Barat	-	31	Papua Barat	70.62
32	Maluku Utara	-	32	NTT	68.77
33	Irian Jaya Barat	-	33	NTB	67.73
34	Kalimantan Utara	-	34	Papua	66.25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan IPM pada seluruh provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan perkembangan IPM menunjukkan peningkatan pada periode Tahun 1999 hingga 2013. IPM tertinggi tentu saja diraih oleh DKI Jakarta, karena merupakan ibukota negara sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mudah dapat diaplikasikan. IPM terendah dimiliki oleh Papua yang terletak paling timur, jauh dari pusat ibukota.

Provinsi Lampung sendiri pada Tabel 1 berada pada peringkat menengah ke bawah. Selama periode 1999 hingga 2013 nilai IPM terus mengalami peningkatan, namun hal ini jika dibandingkan dengan tingkat IPM daerah lain, peringkat Provinsi Lampung secara nasional mengalami penurunan. Selain itu Provinsi Lampung memiliki IPM paling rendah diantara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera lainnya, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara. Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Aceh.

Hal ini seharusnya tidak terjadi karena secara letak geografis, Lampung memiliki letak yang sangat berdekatan dengan ibukota DKI Jakarta, dan Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan IPM. Salah satu tugas pembangunan yang terpenting adalah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pembangunan manusia. Pembangunan manusia atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal yang

sangat penting, upaya untuk meningkatkan mutu SDM dalam pembangunan telah menjadi suatu kebutuhan. Mutu SDM yang baik disuatu wilayah memiliki peranan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya (Putra, 2015).

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan searah adalah dengan lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial akibat kebijakan yang lebih condong pada pertumbuhan ekonomi. Gambar 1 memperlihatkan perbandingan laju perkembangan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM Provinsi Lampung periode 2004-2014.

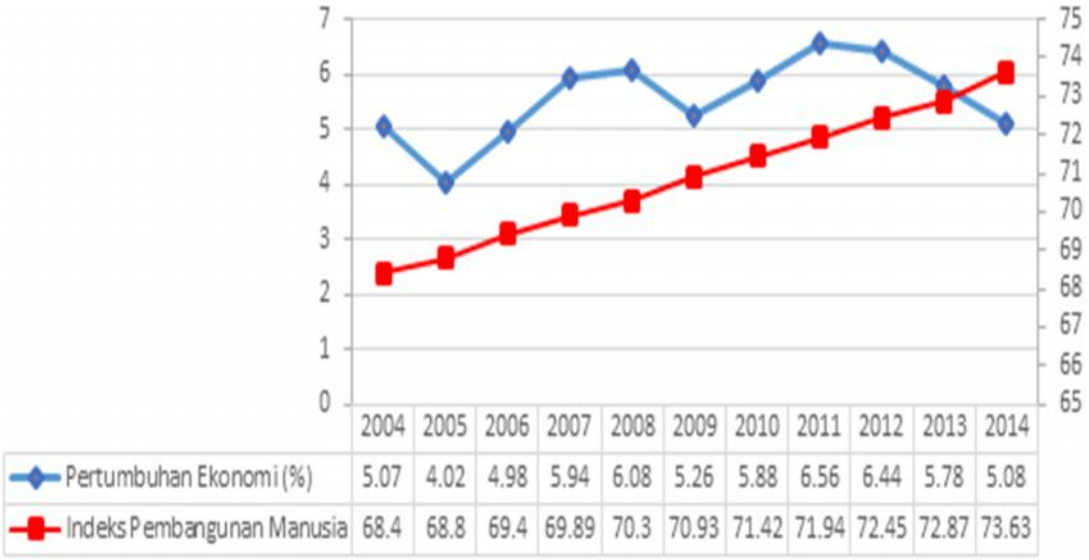

Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka, 2000-2015

Gambar 1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2004-2014

Dari Gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa grafik pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, sedangkan IPM terus memperlihatkan tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak selalu dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan selalu diikuti oleh peningkatan IPM. Masih ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi peningkatan IPM.

Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, yaitu: (1) Peran Stabilisasi, pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapa terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan (Putra, 2015).

Dengan adanya Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah

setempat. Dalam penelitian ini realisasi APBD yang digunakan hanya dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan teori IPM, yang menekankan pentingnya peran pemerintah didalam kedua sektor tersebut. Pemerintah harus mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk sektor kesehatan dari total APBN maupun APBD sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Tabel 2 menunjukan data tentang jumlah realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Lampung yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014

Tahun	Sektor Pendidikan (Ratusan Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)	Sektor Kesehatan (Ratusan Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)
1999	0.06561035740	0	0.06007565496	0
2000	0.08398215000	28	0.15199563000	153.01
2001	0.11194840000	33.3	0.17076520000	12.35
2002	0.26155710000	133.64	0.32899610000	92.66
2003	0.28869000000	10.37	0.34106000000	3.67
2004	0.71566353329	147.9	0.78866549375	131.24
2005	0.33004636049	-53.88	0.87435499624	10.87
2006	0.38622654461	17.02	1.06173200065	21.43
2007	0.86285614336	123.41	0.54296263007	-48.86
2008	0.75431164716	-12.58	1.60866569603	196.28
2009	7.47236590877	890.62	0.27163053692	-83.11
2010	2.36025869519	-68.41	1.19332118836	339.32
2011	2.96885831608	25.79	1.90243253433	59.42
2012	2.84422915478	-4.2	2.60975962752	37.18
2013	3.00193983238	5.54	3.23047278382	23.78
2014	2.95664882843	-1.51	3.34893405336	3.67
	Rata-rata	**79.69**	**Rata-rata**	**59.56**

Sumber: DJPK dan BPS Provinsi Lampung, 2000-2015

Tabel 2 memperlihatkan perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan dalam APBD di Provinsi Lampung tahun 1999-2014. Rata-rata pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung di sektor pendidikan meningkat sebesar 79,69 persen pertahun, perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 890.62 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, sedangkan penurunan sebesar terjadi pada tahun 2010 yaitu -68.41 persen. Dan untuk pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung di sektor kesehatan rata-rata meningkat sebesar 59.56 persen pertahun, perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 339.32 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu -83.11 persen. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan Provinsi Lampung merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian hal ini diharapkan akan berdampak positif bagi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk dibahas mengenai pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Selain itu penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, serta pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada periode Tahun 1999-2014.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai hasil penelitian antara faktor-faktor yang mempengaruhi IPM pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama-sama terhadap IPM di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014.

4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama-sama terhadap IPM di Provinsi Lampung Tahun 1999-2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pemenuhan syarat kelulusan bagi penulis.
2. Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis.
3. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai kajian dan penelitian tentang pembangunan manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep pembangunan selama ini hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), padahal pencapaian kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya dengan menekankan pada pembangunan ekonomi dan infratruktur fisik, melainkan juga dengan pembangunan manusia (*human development*). Adanya pergeseran paradigma pembangunan memerlukan keselarasan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dihubungkan dengan atau dipengaruhi oleh 2 (dua) jalur utama, yaitu jalur aktivitas rumah tangga, mencakup rumah tangga serta berbagai organisasi kemasyarakatan, serta jalur belanja dan kebijakan pemerintah. Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator

pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996).

Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, perubahan tingkat harga, tingkat pendidikan serta tingkat kesehatan. Tingkat pendapatan dapat digambarkan melalui PDRB per kapita. Ketika tingkat pendapatan atau PDRB per kapita rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia (Ananta, 2013).

Pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin (Ranis, 2004). Dengan kata lain, peningkatan pendapatan memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk (Sen, 1999).

Selain ditentukan oleh tingkat pendapatan, peningkatan pembangunan manusia juga ditentukan oleh sejauhmana efektivitas kebijakan publik dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya, seperti yang diwujudkan dalam alokasi pengeluaran pemerintah (Ananta, 2013). Sebagaimana yang dilaporkan dalam studi Chakraborty,

peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan sebesar US$ 1.000,00 akan menaikkan IPM sebesar 0,5 (Chakraborty, 2002).

Secara singkat kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 2. Penelitian ini akan menggunakan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebagai determinan IPM Provinsi Lampung.

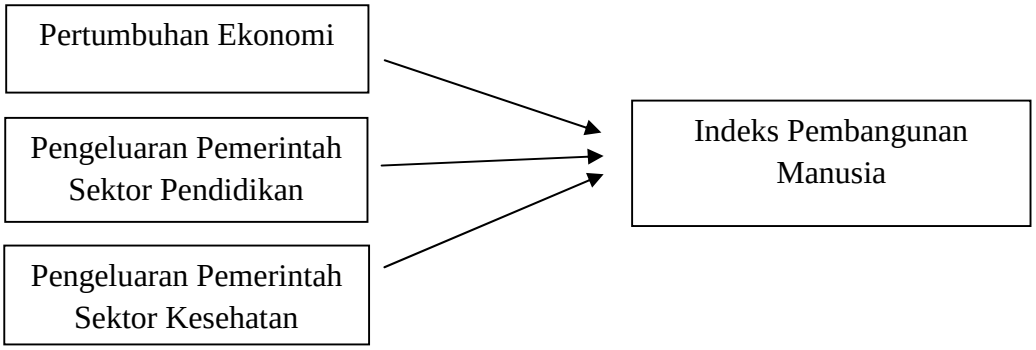

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini diduga:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.
3. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

4. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Menguraikan secara ringkas landasan teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bab ini berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dikaji dan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pikir, serta beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian tersebut.

III. Metode Penelitian

Memuat tentang metode pencarian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, berserta sumber data dan batasan variabel.

IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menyajikan hasil estimasi data melalui alat analisis yang telah disediakan.

V. Penutup

Memuat kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Manusia

1. Konsep Pembangunan Manusia

Dewasa ini pemikiran tentang pembangunan (paradigma) telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada Tahun 1990-an. Ada enam alasan mengapa paradigma pembangunan manusia ini bernilai penting, yaitu: (1) Pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; (2) Mengemban misi pemberantasan kemiskinan; (3) Mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; (4) Memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (5) Memperkuat basis *civil society* dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan (6) Merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan (Ananta, 2013).

Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu yang otonom, yang memungkinkan mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia unggulan sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan internasional. Secara umum hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin (Basri, 2002).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya yang tercermin pada pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan yang tercermin pada usia hidup panjang dan sehat, dan peningkatan pendidikan yang tercermin pada kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi (BPS, 2006).

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena

penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian dan pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (*capability*) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Pembangunan manusia menjadi dasar penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya (BPS, 2006).

Berdasarkan *Human Development Report* (HDR) paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia; (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan ini;

(3) Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi; dan (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (BPS, 2004).

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dewasa ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas sumber daya manusianya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat (BPS, 2004).

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang

pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, IPM tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidaksetaraan dan sulit mengukur indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004).

Indikator IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purcashing Power Parity Index* (PPP). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari satu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan status standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pengeluaran per kapita (BPS, 2007).

Secara lebih lengkap, tiga dimensi pembangunan manusia diperlihatkan pada Gambar 3, yaitu (1) Dimensi ekonomi yang diwujudkan oleh kehidupan yang layak dan

diukur dengan indikator pengetahuan per kapita riil; (2) Dimensi sosial, diwujudkan oleh tingkat pengetahuan dan diukur oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (3) Dimensi kesehatan, perwujudannya adalah umur panjang dan sehat dengan indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir (Hidayat, 2008). Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut. Angka Harapan Hidup ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur indikator kesehatan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup (AHH) suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat kesehatan masyarakat tersebut (Ananta, 2013).

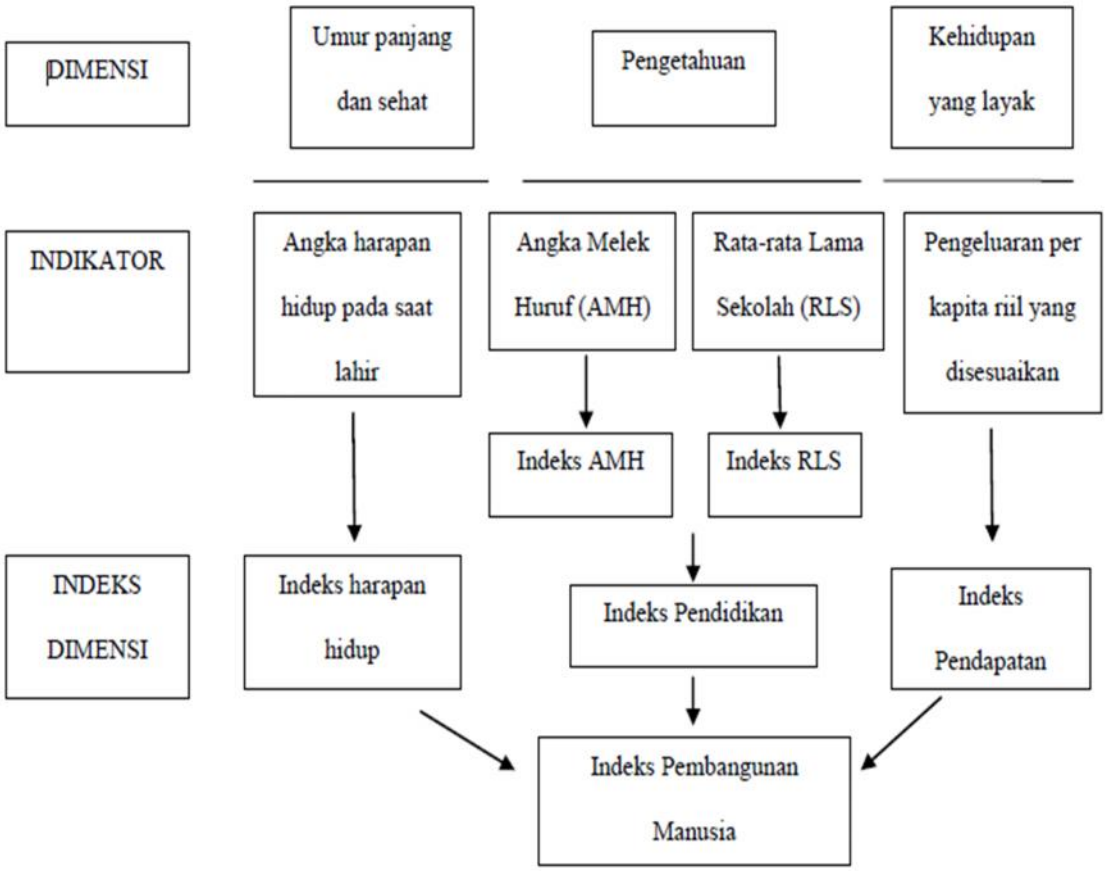

Gambar 3. Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: BPS, 2004

3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Perubahan dalam IPM dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Oleh karena itu, perubahan dalam IPM terkait erat dengan perubahan ketiga indeks tersebut. Terdapat Nilai maksimum dan minimum dari indikator-indikator IPM yang diperlihatkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum IPM

Indikator IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai Standar Global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disertakan	732,720	300,000	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber: BPS, 2004

a. Indeks Harapan Hidup (Indeks Kesehatan)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas. Angka Harapan Hidup sebagai indikator harapan hidup (indeks kesehatan). Dalam perhitungan indeks kesehatan, digunakan angka harapan hidup sebagai indikator. Rumusan yang digunakan untuk menghitung indeks kesehatan (IK) diadopsi dari UNDP adalah (Maqin, 2007):

$$IHH = \frac{(Xt - Xmin)}{(Xmax - Xmin)}$$

Keterangan:

IHH = Indeks Harapan Hidup

X_t = Angka Harapan Hidup pada tahun tertentu

X_{min} = Angka Harapan Hidup minimum = 25

X_{max} = Angka Harapan Hidup maksimum = 85

b. Indeks Pendidikan

Menurut Maqin (2007) selain memasukkan indeks kesehatan, perhitungan IPM juga memasukkan indeks pendidikan. Indeks pendidikan berbeda dengan indeks kesehatan, karena di dalam indeks pendidikan mengakomodir dua indikator komponen prestasi, yaitu: indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks melek huruf dihitung berdasarkan perubahan angka melek huruf, sedangkan indeks rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan angka rata-rata lama sekolah. Rumusan yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan (IPd) berdasarkan BPS dan UNDP adalah:

Rumus Untuk Menghitung Indeks Melek Huruf

$$IMH = \frac{(Xt - Xmin)}{(Xmax - Xmin)}$$

Keterangan:

IMH = Indeks Melek Huruf

X_t = Angka Melek Huruf pada tahun tertentu

X_{min} = Angka Melek Huruf minimum = 0

X_{max} = Angka Melek Huruf maksimum =100

Rumus Untuk Menghitung Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

$$ILS = \frac{(Xt - Xmin)}{(Xmax - Xmin)}$$

Keterangan:

ILS = Indeks rata-rata Lama Sekolah

X_t = Angka Indeks rata-rata Lama Sekolah pada tahun tertentu

X_{min} = Angka Indeks rata-rata Lama Sekolah minimum = 0

X_{max} = Angka Indeks rata-rata Lama Sekolah maksimum =15

Rumus Untuk Menghitung Indeks Pendidikan

$$IPd = \frac{2}{3}(IMH) + \frac{1}{3}(ILS)$$

Keterangan:

IPd = Indeks Pendidikan

IMH = Indeks Melek Huruf

ILS = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

2/3 = Bobot IMH yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP

1/3 = Bobot ILS yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP

c. Indeks Pendapatan (Indeks Daya Beli)

Kemampuan Daya Beli Penduduk atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung IPM. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan *income per capita*.

Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan. Untuk menghitung indeks pendapatan digunakan rumus dari BPS dan UNDP adalah sebagai berikut (Maqin, 2007):

$$IP = \frac{(Xt - Xmin)}{(Xmax - Xmin)}$$

Keterangan:

IP = Indeks Pendapatan

X_t = Pengeluaran Per Kapita Riil yang disesuaikan pada tahun tertentu

X_{min} = Pengeluaran Per Kapita Minimal = Rp 300.000

X_{max} = Pengeluaran Per Kapita Maksimum = Rp 732.720

Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan, selanjutnya dilakukan perhitungan indeks pendapatan. Indeks pendapatan menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat, oleh karena itu semakin tinggi indeks pendapatan maka semakin tinggi daya beli per kapita penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli secara implisit menunjukkan kenaikkan kesejahteraan melalui kenaikan pendapatan dan stabilitas harga, sehingga pada akhirnya mutu pembangunan manusia meningkat, melalui perubahan *Human Development Index* (HDI). Konsep tersebut lebih mengasumsikan bahwa kenaikkan indeks daya beli atau kenaikkan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sejalan dengan kenaikan pendapatan absolut dan pendapatan riil. Meskipun demikian, suatu hal yang ekstrim bisa saja terjadi, dimana kenaikkan pengeluaran riil per kapita lebih disebabkan oleh

insentif stabilitas inflasi, sehingga kemungkinan kenaikan pendapatan absolut sebenarnya (riil) tidak terjadi (Maqin, 2007).

Merujuk pada ke tiga indikator IPM, maka angka IPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS, 2004):

$$IPM = \frac{1}{3} \times (IHH + IPd + IP)$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia *(Human Development Index)*

IHH = Indeks Harapan Hidup

IPd = Indeks Pendidikan

IP = Indeks Pendapatan

IPM mencoba untuk memberikan peringkat semua negara dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi), hal ini dapat dilihat pada tabel 4 yang menunjukkan kriteria pemeringkatan nilai IPM.

Tabel 4. Kriteria Pemeringkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	**Kategori**
< 50	Rendah
50 ≤ IPM < 66	Menengah bawah
66 ≤ IPM < 80	Menengah atas
≥ 80	Tinggi

Sumber: BPS, 2004

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi penduduk bertambah. Dalam tingkat negara seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri diukur secara agregat dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perubahan peningkatan PDB riil pada periode tertentu. Pada tingkat rumah tangga ataupun individu pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari peningkatan pendapatan rumah tangga atau pendapatan perkapita (Todaro dan Smith, 2006).

Todaro dan Smith (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau SDM.
2. Pertumbuhan penduduk yang pada tahun-tahun berikutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Menurut Sukirno (2006) beberapa faktor penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya.
2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja.
3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi.
4. Sistem ekonomi dan sikap masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Faktor teknologi adalah dinamis dan ditentukan oleh mutu modal manusia. Menurut teori pertumbuhan modern, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal fisik (kapital) saja, tetapi juga dari produktivitas tenaga kerja yang berkaitan erat dengan peningkatan mutu modal manusia (Sukirno, 2006).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dari masa ke masa. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang menonjol antara lain:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

   Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan

kekayaan alam, serta penerapan teknologi. Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan kekayaan alam, serta penerapan teknologi adalah tetap (Alam, 2007).

Gambaran teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah seperti berikut (Alam, 2007):

1) Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang modal cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas.
2) Pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang (*stationeary state*) saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun.

2. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Model pertumbuhan ekonomi Neoklasik merupakan salah satu model pertumbuhan yang banyak menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara dan salah satu kontributor utamanya adalah Robert Solow (Todaro dan Smith, 2006). Secara teoritis dasar dari teori petumbuhan Solow adalah sisi penawaran dengan menggunakan fungsi produksi sebagai alatnya. Secara sederhana teori ini menyatakan bahwa faktor produksi modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*) merupakan dua faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan fungsi produksi diasumsikan memiliki skala

pengembalian konstan (*constant return to scale*), dimana masing-masing faktor produksi mengalami *diminishing returns* (Ananta, 2013).

Solow berpendapat bahwa akumulasi modal secara fisik saja tidak cukup untuk menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara. Oleh karena itu model pertumbuhan Solow dirancang untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan dalam persediaan modal, pertumbuhan dalam angkatan kerja, serta kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Namun diasumsikan bahwa tabungan dan kemajuan teknologi adalah eksogen. Jika tabungan meningkat maka investasi meningkat sehingga persediaan modal meningkat. Dengan meningkatnya persediaan modal maka selanjutnya output meningkat akan tetapi pertumbuhan output yang diakibatkan oleh tabungan sifatnya sementara (Ananta, 2013).

Model Solow menggunakan asumsi-asumsi dengan memfokuskan pada empat variabel yaitu output (Y), modal (K), tenaga kerja (L), dan knowledge atau disebut sebagai efektivitas tenaga kerja (A), pada waktu tertentu (t). Hubungan keempat variabel tersebut jika dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi adalah sebagai berikut (Ananta, 2013):

$Y(t) = F(K(t), A(t) L(t))$

Dimana : t adalah dimensi waktu.

Adapun beberapa asumsi untuk menjelaskan model Solow adalah :

1. Asumsi utama model Solow bahwa fungsi produksi adalah "*constant return to scale*" yang berarti kenaikan output memiliki proporsi yang sama dengan penambahan input.
2. Tidak ada campur tangan pemerintah
3. Kemajuan teknologi dan tabungan adalah eksogen dan konstanta.

3. Teori Pertumbuhan Endogen

Kinerja teori Neoklasik yang tidak memuaskan dalam menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang telah menyebabkan kekecewaan yang meluas terhadap teori pertumbuhan tradisional. Teori pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*) mencerminkan suatu pemikiran baru mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merupakan komponen kunci dari teori pembangunan yang baru muncul. Teori pertumbuhan baru tersebut memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen, yaitu pertumbuhan GNP yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi (Todaro dan Smith, 2006).

Motivasi utama dari teori pertumbuhan baru ini adalah untuk menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara maupun faktor-faktor yang memberi proporsi lebih besar dalam pertumbuhan yang diobservasi. Sehingga teori pertumbuhan baru ini lebih dikenal sebagai teori pertumbuhan endogen karena menolak asumsi model Solow tentang perubahan teknologi yang berasal dari luar (eksogen). Model pertumbuhan endogen mempunyai kesamaan secara struktural dengan model Neoklasik, namun sangat berbeda dalam hal asumsi yang

mendasarinya serta kesimpulan yang ditarik darinya. Perbedaan teoritis yang paling signifikan berasal dari dikeluarkannya asumsi Neoklasik tentang hasil marjinal yang semakin menurun atas investasi modal, memberikan peluang terjadinya skala hasil yang semakin meningkat (*increasing returns to scale*) dalam produksi agregat. Teori pertumbuhan endogen berupaya menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antar negara. Dan karena teknologi masih memainkan peran penting dalam model-model ini, perubahan eksogen tidak diperlukan lagi untuk menjelaskan pertumbuhan jangka panjang (Todaro dan Smith, 2006).

Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menekankan pada peluang-peluang pertumbuhan yang berbeda dalam modal fisik (*physical capital*) dan modal pengetahuan (*knowledge capital*). Terdapat *diminishing marginal returns* bagi modal fisik, namun tidak bagi modal pengetahuan. Pemikiran bahwa meningkatnya investasi dalam pengetahuan akan meningkatkan pertumbuhan adalah kunci untuk menghubungkan tingkat tabungan yang lebih tinggi dengan tingkat pertumbuhan keseimbangan yang lebih tinggi. Jadi dalam teori pertumbuhan endogen berusaha menjelaskan tingkat kemajuan teknologi, yang dalam model Solow disebut variabel eksogen. Model ini berusaha menjelaskan keputusan-keputusan yang menentukan penciptaan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan. Model Solow kemudian dikembangkan oleh Mankiw, Romer dan Weil (1992), Wang dan You (2002) dengan masukkan unsur

kualitas human capital (*quality of human capital*) ke dalam model pertumbuhan (Maqin, 2006).

Untuk menggambarkan gagasan di belakang teori pertumbuhan endogen, kita mulai dengan fungsi produksi sederhana :

$$Y = AK$$

dimana A merupakan konstanta yang mencerminkan tingkat teknologi, K dalam pengertian yang lebih luas meliputi modal manusia, maka output perkapita adalah $Y = AK$. Dalam fungsi produksi ini tidak menunjukkan muatan dari pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan memproduksi unit output tambahan sebesar A, tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan model Solow (Mankiw, 2005).

Berikutnya bagaimana fungsi produksi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kita asumsikan sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Karena itu akumulasi modal dengan persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya :

$$\Delta K = sY - \delta K$$

Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan dalam persediaan modal (ΔK) sama dengan investasi (sY) dikurang penyusutan (δK). Menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi $Y = AK$, kita dapatkan :

$$\Delta Y/Y = \Delta K/K = sA - \delta$$

Persamaan ini menunjukan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output $\Delta Y/Y$. dimana, selama $sA > \delta$, pendapatan perekonomian menentukan tingkat

pertumbuhan selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen (Mankiw, 2005).

3. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia dipengaruhi oleh 2 (dua) jalur utama, yaitu jalur aktivitas rumah tangga, mencakup rumah tangga serta berbagai organisasi kemasyarakatan, serta jalur belanja dan kebijakan pemerintah. Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996). Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, perubahan tingkat harga, tingkat pendidikan serta tingkat kesehatan. Tingkat pendapatan dapat digambarkan melalui PDRB per kapita. Ketika tingkat pendapatan atau PDRB per kapita rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia (Ananta, 2013).

Pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi

dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin (Ranis, 2004). Dengan kata lain, peningkatan pendapatan memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk (Sen, 1999).

C. Pengeluaran Pemerintah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik (Putra, 2015).

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G = T$). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ($G < T$). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan ($G > T$). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika

pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya (Ananta, 2013).

1. Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah terdiri dari:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Ananta, 2013).

Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang

dialokasikan untuk menaikan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dalam dan luar negeri yaitu pada saat implikasi di saat pengembalian (Ananta, 2013).

Dalam kasus pinjaman dalam negeri, pembayaran bunga utang oleh pemerintah akan kembali dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena terjadi transfer pendapatan oleh kelompok masyarakat yang membayar pajak kepada kelompok masyarakat yang menjadi kreditur. Sedangkan dalam kasus pinjaman luar negeri, terjadi aliran dampak ekonomi *(multiplier effect)* yang berbeda. Pihak-pihak yang menerima pengembalian pinjaman adalah pihak kreditur di luar negeri (Ananta, 2013).

Jumlah utang luar negeri yang semakin besar menyebabkan anggaran yang digunakan untuk membayar bunga utang juga semakin meningkat. Meningkatnya jumlah pembayaran bunga utang tersebut selain disebabkan oleh membengkaknya jumlah utang jatuh tempo juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selain pengeluaran untuk belanja pegawai dan pembayaran bunga utang, pos lain yang menarik adalah pengeluaran pemerintah untuk berbagai subsidi. Satu pos diantaranya yang berperan cukup besar adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi ini muncul pada pada Tahun 1997/1998 sebagai akibat dari melonjaknya harga minyak mentah di pasar dunia menyebabkan meningkatnya biaya pengadaan BBM sehingga melebihi hasil penjualan BBM itu sendiri. Akibatnya pemerintah terpaksa memberikan subsidi

terutama terhadap minyak tanah dan solar. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan kementrian atau lembaga negara non kementrian dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap (Ananta, 2013).

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin (Suminto, 2004).

Sehubungan dengan hal tersebut formulasi distribusi dan alokasi dari penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target

kebijaksanaan fiskal. Di samping itu, pengelolaan anggaran permbangunan juga harus tetap di tempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan (Ananta, 2013).

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada kementrian dan lembaga pemerintah non kementrian di tingkat pusat termasuk Kementrian Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Basri, 2002).

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan. Di samping itu juga dilakukan

pengadaan prasarana pendukung Hankam, Telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan (Basri, 2002).

Sebagaimana diamanatkan oleh UU No.17 Tahun 2003, maka system penganggaran mengacu pada praktek-praktek yang berlaku secara internasional. Menurut *GFS (Government Financial Statistics) Manual 2001*, sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem *unified budget*, dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Sejak Tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi (Ananta, 2013).

Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja negara yang baru, maka belanja negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bunga utang, (v) subsidi, (vi) hibah, (vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain. Sedangkan belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari (i) dana perimbangan, dan (ii) dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (*unified budget*) (Suminto, 2004).

Beberapa pengertian dasar terhadap komponen-komponen penting dalam belanja tersebut antara lain (Suminto, 2004):

1. Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin dan pembangunan. Di sinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih.

2. Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan.

3. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja modal asset tetap/fisik, dan (ii) belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya nonfisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan.

4. Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui perusahaan negara dan perusahaan swasta.

5. Selama ini ada jenis subsidi yang sebetulnya tidak ada unsur subsidinya, maka belanja tersebut akan dikelompokkan sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial.

6. Belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

2. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) dengan IPM

Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi pengeluaran pada sektor kesehatan dan pendidikan, pemerataan tingkat pendapatan serta penurunan angka kemisikinan melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan.

Manusia dalam perannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan (Putra, 2015).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain. Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya (Putra, 2015).

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada IPM (Putra, 2015).

D. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Jenis data dan alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Prayudha Ananta (2013)	Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung	IPM, PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan	Data sekunder / Uji regresi data panel	Secara bersama-sama variabel PDRB per kapita, variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan tiap kabupaten/kota secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel IPM tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2.	Devianti Patta (2012)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010	IPM, Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan ketimpangan distribusi pendapatan	Data sekunder / Time series, OLS (*Ordinary Least Square*), regresi linear berganda	1). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan 2). Persentase penduduk miskin berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan. 3). Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan. 4). Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Selatan.
3.	Citra Afnovinsa Putri (2014)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan	IPM, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan dan jumlah penduduk miskin	Data sekunder / Time series, OLS (*Ordinary Least Square*), regresi linear berganda	1). Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan secara parsial dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. 2). Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan secara parsial dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. 3). Jumlah penduduk miskin secara parsial dan bersama-

		Manusia Provinsi Lampung periode 2003-2012			sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.
4.	Denni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	IPM, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal	Data sekunder / Uji data panel yaitu gabungan *time series* dan *cross section*	1).Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 2).Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 3).Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
5.	Christina Usmaliadanti (2011)	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap IPM Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009	IPM, kemiskinan, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan	Data sekunder / Uji regresi data panel	1). Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 2). Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. 3). Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.
6.	Adi Dwi Putra (2015)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.	IPM, Tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Data sekunder / Time series, OLS (*Ordinary Least Square*), regresi linear berganda	1). Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. 2). Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. 3). Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. 4). Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder, yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan tiga variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), maupun sumber data sekunder lainnya. Data berupa data *time series* Tahun 1999 hingga Tahun 2014.

Tabel 5. Deskripsi Variabel

Variabel	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	BPS
Pertumbuhan Ekonomi (GRWT)	Persentase	BPS
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (EGE)	Ratusan Milyar Rupiah	DJPK
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (HGE)	Ratusan Milyar Rupiah	DJPK

B. Batasan Variabel Operasional

Variabel penelitian yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar, yaitu indeks harapan hidup (IHH), indeks pendidikan (IPd), dan indeks pendapatan (IP). Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IPM Provinsi Lampung periode Tahun 1999-2014. Data IPM yang digunakan diperoleh dari BPS Provinsi Lampung. Satuan pengukuran data IPM yang digunakan adalah indeks.

2. Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus, disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) pada suatu tahun dikurang dan kemudian dibagi dengan PDRB ADHK pada tahun sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100%. Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung periode Tahun 1999-2014. Data

pertumbuhan ekonomi yang digunakan diperoleh dari BPS Provinsi Lampung. Satuan pengukuran data pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah persentase.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

   Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan alokasi dana APBN/APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang pendidikan. Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Lampung periode Tahun 1999-2014. Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang digunakan diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Satuan pengukuran data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang digunakan adalah ratusan milyar rupiah.

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

   Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan alokasi dana APBN/APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Provinsi Lampung periode Tahun 1999-2014. Data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang digunakan diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Satuan pengukuran data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang digunakan adalah ratusan milyar rupiah.

C. Spesifikasi Model Penelitian

Analisis data menggunakan model regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (GRWT), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (EGE) dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (HGE) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Model umum dari analisis ini adalah:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 GRWT + \beta_2 EGE + \beta_3 HGE + \varepsilon$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia, diukur dalam indeks

GRWT = Pertumbuhan Ekonomi, diukur dalam persentase per tahun

EGE = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, diukur dalam ratusan milyar rupiah per tahun

HGE = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, diukur dalam ratusan milyar rupiah per tahun

β_0 = Intersep

βi = Koefisien variabel bebas

ε = Variabel gangguan

D. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan program komputer yaitu menggunakan program *E-Views 8.0* .

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data di Provinsi Lampung yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Biro Keuangan Provinsi Lampung. Data tersebut meliputi data Indeks Pembangunan Manusia, data Pertumbuhan Ekonomi, data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan data Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.

F. Evaluasi Model

Menurut Gujarati (2003) untuk menghasilkan model yang efisien dan konsisten, maka perlu adanya evaluasi **a**gar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tersebut tidak bias atau bahkan menyesatkan. Dengan melakukan uji penyimpangan klasik maka dapat diperoleh penaksiran yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Uji penyimpangan asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui kenormalan *error term* dan variabel-variabel baik variabel bebas maupun terikat, juga untuk mengetahui apakah data sudah menyebar secara normal. Uji normalitas dapat dilihat dengan metode

Jarque-Berra (Uji JB). Metode JB ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsuikan bersifat *asymptotic*. Uji statitik dari JB ini menggunakan perhitungan *skewness* dan *kurtosis*. Uji JB menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Jarque–Bera stat > Chi square, *p-value* < 5%, artinya data tidak terdistribusi dengan normal
- Ha : Jarque–Bera stat < Chi square, *p-value* > 5%, artinya data terdistribusi dengan normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standart errors and covariance heteroskedastisiticty*. Untuk uji white menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut :

- H_0 : Obs*R square (χ^2 -hitung) > Chi-square (χ^2–tabel), *p-value* < 5%, artinya model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas.
- Ha : Obs*R square (χ^2 -hitung) < Chi-square (χ^2–tabel), *p-value* > 5%, artinya model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi model regresi klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dalam persamaan. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimitasi. Jika VIF < 10 maka antara variabel independen tidak terjadi hubungan yang linier (tidak ada multikolinearitas). Uji multikolinearitas menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : VIF > 10, artinya terdapat multikolinearitas antar variabel independen.
- Ha : VIF < 10, artinya tidak ada mutikolinearitas antar variabel independen.

4. Uji Autokorelasi

Suatu model regresi dikatakan terkena autokorelasi, jika ditemukan adanya korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada

periode t-1 (periode sebelumnya). Autokorelasi hanya ditemukan pada regresi yang datanya time series. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* atau uji LM.

Uji LM menjelaskan apabila nilai Chi squared hitung (Obs*R- squared) lebih kecil dari nilai Chi squared kritis pada α=5% maka tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Sebaliknya apabila Chi squared hitung (Obs*R-squared) lebih besar dari pada Chi squared kritis pada α=5% dan probabilitas (Obs*R-squared) lebih kecil dari α=5% maka terdapat adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji LM menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Obs*R squared (χ^2 -hitung) > Chi-square (χ^2–tabel), *p-value* < 5%, artinya model regresi mengalami masalah autokorelasi.
- Ha: Obs*R squared (χ^2 -hitung) < Chi-square (χ^2–tabel), *p-value* > 5%, artinya model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

G. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Digunakan uji 1 arah pada tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

Hipotesis 1

H_0 : $\beta_1 \leq 0$ Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Ha : $\beta_1 > 0$ Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Hipotesis 2

H_0 : $\beta_2 \leq 0$ Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Ha : $\beta_2 > 0$ Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Hipotesis 3

H_0 : $\beta_3 \leq 0$ Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Ha : $\beta_3 > 0$ Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Kriteria pengambilan keputusan :

- Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a, artinya variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.
- Jika nilai t-hitung ≤ nilai t-tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a, artinya variabel bebas tidak berpengaruh positif terhadap variabel terikat.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Digunakan uji-F statistik pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan df1 = (k-1) dan df2 = (n-k) dengan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2003):

H_0 : $\beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ Diduga secara besama-sama, paling tidak satu dari variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

H_a : $\beta_1, \beta_2 \beta_3 \neq 0$ Diduga secara besama-sama, paling tidak satu dari variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Kriteria pengambilan keputusan :

- Jika F-hitung > F-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a, artinya secara besama-sama, paling tidak satu dari variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika F-hitung ≤ F-tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a, artinya secara besama-sama, paling tidak satu dari variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

H. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Kisaran nilai koefisien determinasi (R^2) adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Model dikatakan semakin baik apabila nilai R^2 mendekati 1 atau 100% (Gujarati, 2003).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan terkait tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga yang memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Apabila kualitas pendidikan lebih baik maka kualitas SDM akan meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih layak.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Apabila kualitas kesehatan lebih baik maka kualitas SDM akan meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih layak.

4. Variabel pertumbuhan ekonomi, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

B. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung antara lain:

1. Melihat besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung hendaknya melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan hasil-hasil ekonomi keseluruh golongan masyarakat. Dengan begitu daya beli masyarakat akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.

2. Melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, maka diharapkan pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan realisasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 20% dari total APBD untuk sektor pendidikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan berupa beasiswa, perbaikan gedung-gedung sekolah yang kurang layak, dan menambah fasilitas-fasilitas pendidikan seperti buku-buku bacaan di setiap institusi pendidikan yang ada di Provinsi lampung.

3. Melihat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung, maka diharapkan pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan realisasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan 10% dari total APBD untuk sektor kesehatan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, serta mengadakan pengobatan-pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. 2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Esis.

Ananta, Prayudha. 2013. *Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung.* Tesis. FEB Universitas Lampung.

Arif, Hubban. 2013. *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. FE Universitas Bung Hatta.

Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia.* Erlangga. Jakarta.

BPS. 2000-2015. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*, beberapa terbitan. BPS Provinsi Lampung. Lampung.

BPS. 2000-2015. *Lampung Dalam Angka*, beberapa terbitan. BPS Provinsi Lampung. Lampung.

BPS. 2005. *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004*. BPS, Jakarta.

Chakraborty, Shankha. 2002. *Endogenous Lifetime and Economic Growth*. Working Papers. Department of Economics. Portland: University of Oregon.

Gujarati, N. Damodar. 2003. *Basic Econometrics fourth edition*. McGraw-Hill.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang. Erlangga, Jakarta

Mankiw, N. Gregory. 2005. *Macroeconomics* 6th Edition,Worth Publishers 41 Madison Avenue New York, NY.

Maqin, Abdul. 2006. *Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pembangunan Manu*sia di Jawa Barat periode 1993 – 2003. Publikasi Disertasi Fakultas Ekonomi UNPAD, Bandung.

Maqin, Abdul. 2007. *Indeks Pembangunan Manusia: Tinjauan Teoritis dan Empiris di Jawa Barat*. FE Universitas Pasundan, Sumedang.

Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Nagib, Laila. 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia : di antara peluang dan tantangan.* Jakarta: LIPI Press.

Patta, Devianti. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010.* FE Universitas Hasanuddin. Makassar.

Putra, Adi Dwi. 2015. *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*. FEB Universitas Lampung.

Putri, Citra Afnovinsa. 2014. *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan dan jumlah penduduk miskin terhadap IPM di Provinsi Lampung.* FEB Universitas Lampung.

Ranis, Gustav. 2004. *Human Development and Economic Growth*. Working Papers 887. Economic Growth Center. New Haven: Yale University.

Sen, A.K. 1999. *Development as Freedom.* New York: Oxford University Press.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses masalah dan Dasar Kebijakan, Cetakan ketiga*, Kencana. Jakarta.

Suminto. 2004. *Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara.* Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran Departemen Keuangan). Jakarta.

Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Ul Haq, Mahbub. 1998. *Reflections on Human Development*. Oxford. CUP.

UNDP. 1990. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.

UNDP. 1996. *Economic Growth and Human Development*. Human Development Reports 1996. New York: Oxford University Press.

UNDP. 2000. *Human Right and Human Development*. Human Development Reports 2000. New York: Oxford University Press.

Usmaliadanti, Christina. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. FE Universitas Diponegoro. Semarang.

Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.